

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dapat disusun sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang merupakan dasar dalam acuan pembuatan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2026 Biro Administrasi Pembangunan ini masih perlu penyempurnaan, Walau demikian, besar harapan kami semoga Renja ini bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas. Sehingga pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai yang dengan rencana dan mencapai target yang telah ditentukan.

Jambi, Mei 2025

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,



Hj. Era Prihantiwi M, S.Hut, M.Env, Mng
Pembina Utama Muda
NIP.19730107 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1.2. Tujuan dan sasaran	
1.3. Landasan Hukum	
1.4. Sistematika Penyusunan Renja TA 2026	
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1. Tugas dan Fungsi	
2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	
3.2. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi	
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2026	
4.1. Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan	
4.2. Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi Tahun 2026	
PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku.

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keselarasan perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi serta mewujudkan visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Setda Provinsi Jambi, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan tupoksi secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

1. *Kaitan Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan TUPOKSI*

Dengan berlakunya UU. No 17/2003 serta adanya Permendagri No. 13 tahun 2006, nomenklatur sektor dan bidang pemerintahan harus diadaptasi ke

dalam nomenklatur fungsi pemerintahan sesuai TUPOKSI yang akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun indikasi rencana program lima tahunan dan tahunan bagi setiap unit kerja. Dengan demikian Renja Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Sebagai Implementasi operasional atas Rencana Strategis Setda Provinsi Jambi.
- b. Menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Tupoksi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2026.
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2026.
- d. Menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian (evaluasi) program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini adalah untuk menetapkan prioritas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 guna memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2026 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan serta menjadi pedoman rencana kerja anggaran yang berbasis kinerja.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026;

D. Sistematika Penyusunan Renja TA 2026

Rencana Kerja TA 2026 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Tugas dan Fungsi
- 2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
- 4.2. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode jangka menengah RENSTRA Tahun 2021-2026 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran / target RENSTRA tahun 2021 - 2026 menurut Indikator Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan / atau indikator lainnya disajikan pada tabel Berikut :

Realisasi Capaian Indikator Renstra

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi

Tujuan (**)	Sasaran (***)	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja									
							2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Capaian Kinerja	Rp	Capaian Kinerja	Rp	Capaian Kinerja	Rp	Capaian Kinerja	Rp	Capaian Kinerja	Rp
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Tujuan 1	Sasaran 1.1	Persentase SKPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	100 % (30 Dokumen)	100 % (5 Dokumen)	232.424.250	100 % (5 Dokumen)	593.052.290	100 % (5 Dokumen)	462.897.900	100 % (5 Dokumen)	778.487.500	100%	856.336.250	100 %	185.646.950	100 %	572.804.064	100 %	426.115.091	100 % (5 Dokumen)	743.397.090	100%	287.110.183
				Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi	5 Dok	1 Dok	95.964.250	1 Dok	333.052.290	1 Dok	249.322.900	1 Dok	594.813.000	5 dok / 11 kab/kota	654.294.300	1 Dok	88.860.250	1 Dok	331.019.364	1 Dok	213.627.511	1 Dok	571.752.300	5 dok / 11 kab/kota	166.913.100
Tujuan 2	Sasaran 2.2	Jumlah laporan hasil evaluasi		Monitoring dan Evaluasi Penyerapan	Jumlah laporan hasil evaluasi	15 Dok	3 Dok	136.460.000	3 Dok	260.000.000	3 Dok	213.575.000	3 Dok	183.674.500	4 laporan/4 kali	202.041.950	3 Dok	96.786.700	3 Dok	241.784.700	3 Dok	212.487.580	3 Dok	171.644.790	4 laporan/4 kali rapat/	120.197.083

		si pelaks anaan APBD Prov. Jambi		Realisasi Anggaran	pelaksan aan Belanja Langsun g dan Tidak Langsun g APBD Prov. Jambi ke Pemerint ah RI									rapat /11 kab/k ota										11 kab/ko ta		
Tuju an 3	Sas aran 3.1	Meningk atnya pengend alian pelaksan aan bidang pekerjaa n umum dan perhubu ngan serta meningk atnya aksesibili tas dan kualitas insfrastr uktur umum.		Program Pembina an Pelaksan aan Pemban gunan Bidang PU, Perhubu ngan dan PBJ Pemerint ah	Meningk atnya aksesibil itas dan kualitas infrastru ktur daerah serta terlaksa nanya PBJ sesuai ketentua n	98%	100%	1.382.2 59.750	100%	1.286.4 47.000	100%	1.294.3 63.850	100%	3.264.3 17.605	100%	1.488.4 44.957	100 %	1.158.9 58.328	100 %	1.234.4 78.970	100 %	1.285.8 17.020	100%	3.142.3 51.278	100%	1.445.8 14.200
Tuju an 2	Sas aran 2.1	Jumlah laporan pelaksan aan dan evaluasi Pengada an Barang/J asa Pemerint ah di Prov. Jambi		Kegiatan manajem en pengadaa n dan informasi	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administr asi teknis	95%	100%	344.229 .950	100%	419.625 .750	100%	397.513 .500	100%	2.036.6 60.214	4 kali rapat/ 300 paket/ 300 dok	1.136.2 58.217	100 %	334.643 .779	100 %	377.803 .350	100 %	393.450 .607	100%	1.948.0 52.468	4 kali rapat/ 300 paket/ 300 dok	1.132.6 43.635

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi

				Kegiatan Fasilitasi Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan SDM	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monev dal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ	100 %	100%	92.600.000	100%	236.821.250	100%	259.186.700	100%	497.890.198	10 pend ampi ngan/ 2 kali bimtek	130.985.903	100 %	88.306.449	100 %	231.371.865	100 %	258.102.202	100%	465.237.243	10 penda mpin gan/2 kali bimtek	119.985.403
				Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan / Pembangunan sarana prasarana fisik dan perhubungan	Jumlah rekomendasi / rumusan kebijakan yang dihasilkan	5 Dok	1 Dok	666.037.800	1 Dok	290.000.000	1 Dok	275.000.000	1 Dok	326.104.500	12 reko men d asi/1 1 kab/k ota/4 lapor an	135.169.050	1 dok	456.616.100	1 Dok	287.385.556	1 dok	271.753.462	1 Dok	326.104.500	12 rekom endasi/11 kab/k ota/4 lapora n	134.711.734
				Kegiatan Layanan Pengaduan dan Pembinaan Serta Kelembagaan LPSE	Tingkat kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ	NA	0	-	0	-	0	-	0	-	2 org / 11 kab/k ota	86.031.787	-	-	0	-	-	0	-	-	2 org / 11 kab/k ota	58.473.428
				Kegiatan Fasilitasi	meningk atnya	100 %	100%	279.392	100%	340.000	100%	362.663	100%	403.662	-	-	100 %	279.392	100 %	337.918	-	362.510	-	402.957	-	-

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi

				Tata Usaha	kinerja organisasi			.000		.000		.650		.693			.000		.199		.749		.067			
Tujuan 1	Sasaran 1.2	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Prov. Jambi		Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kerjasama	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100%	471.936.000	100%	678.723.710	100%	642.738.250	100%	588.754.895	100%	409.748.819	100 %	354.913.598	100 %	664.477.817	100 %	637.529.359	100%	552.066.958	100%	408.765.958
				Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	4 Laporan	1 Laporan	278.436.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	299.575.250	1 Laporan	293.634.715	10 usulan/9 kali rapat	201.277.674	1 laporan	219.750.098	1 Laporan	210.578.544	1 laporan	297.741.034	1 Laporan	256.948.958	10 usulan/9 kali rapat	201.277.669
				Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Swasta	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	2 Laporan	1 Laporan	193.500.000	1 Laporan	267.000.000	1 Laporan	174.831.500	1 Laporan	150.355.180	3 Lol/MoU / 10 rekomendasi	128.390.690	1 laporan	135.163.500	1 Laporan	262.225.200	1 laporan	173.578.575	1 Laporan	150.353.000	3 Lol/MoU / 10 rekomendasi	127.407.834
				Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan	Jumlah evaluasi Kerjasama	-	0	-	1 Laporan	191.723.710	1 Laporan	168.331.500	1 Laporan	144.765.000	1 Laporan/5 dokumen	80.080.455	-	-	1 Laporan	191.674.073	1 laporan	166.209.750	1 Laporan	144.765.000	1 Laporan/5 dokumen	80.080.455

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi

				aan Pembang unan di Bidang Kerjasam a																						
		Persenta se penataan Tata Usaha Biro PKS Setda Provinsi Jambi		Program Pelayana n Administ rasi Perkantoran	Perse ntase peme nuhan Pelay anan Admin istrasi kantor	100 %	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	239.808 .363	-	-	-	-	-	0	-	100%	239.573 .087	
				Kegiatan Penataan Administ rasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi	Perse ntase Pelaya nan Admini strasi kantor yang difasilit asi	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	239.808 .363	-	-	-	-	-	0	-	100%	239.573 .087	
				Jumlah				2.202.52 6.000		2.558.22 3.000		2.400.00 0.000		4.631.56 0.000		2.381.26 3.428		1.812.41 1.326		2.471.76 0.851		2.349.46 1.470		4.437.81 5.326		2.381.26 3.428

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.3.1. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai beberapa tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang akan dihadapi ke depan antara lain :

- + Adanya perubahan regulasi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional
- + Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat
- + Penyampaian laporan, Penyajian data dan informasi yang belum optimal dan akurat.
- + Adanya perubahan regulasi di bidang penganggaran.
- + Peningkatan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dan pemanfaatan aplikasi program komputer dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran, penyusunan program kerja dan pelaporan keuangan serta pendataan aset.
- + Pengembangan sumber daya aparatur tidak berkelanjutan.
- + Sikap mental aparatur yang tidak mau berubah
- + Penyajian data dan informasi yang belum optimal dan akurat. + Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi

2.3.2. Peluang

- + Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- + Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Aparat Sipil Negara.
- + Permenpan No 11 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2017 – 2019.
- + Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi yang sangat cepat.
- + Memiliki Tugas dan fungsi yang cakupan luas.
- + Membuat regulasi (Peraturan Gubernur) tentang tata cara pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
- + Membuat aplikasi sistem informasi terkait dengan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk memudahkan Perangkat Daerah untuk melaporkan capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan setiap bulannya. Aplikasi ini juga dapat diakses langsung oleh Gubernur
- + Melakukan pembinaan / sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dengan regulasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

BAB IV

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi

3.1. Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Pada RENJA Tahun 2025, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan melalui APBD TA 2025 mendapat alokasi anggaran murni sebesar Rp. 1.621.863.874,00 yang diperuntukan membiayai sebanyak 2 Program, 5 Kegiatan dan 16 sub kegiatan. Sedangkan untuk anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 904.409.454,- (Belanja Operasi) dan Rp. 25.315.000,- (Belanja Modal).

Posisi per September 2025 realisasi anggaran Belanja Operasi yang terserap sebesar Rp 654.666.672,- (72.39 %) dan Belanja Modal terserap sebesar Rp. 25.315.000,- (100 %) dan sisa anggaran Rp 249.742.782,-.

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara rinci serapan anggaran per sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Keuangan dan Fisik berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI JAMBI

No	Program / Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran APED			Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	33.105.000	0	33.105.000	33.105.000	0	0	0	33.105.000	32.087.604	0	0	0	32.087.604	96,93	97,78	1.017.396
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	0	0	0	2.270.000	1.912.500	0	0	0	1.912.500	57,82	67,82	957.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	0	0	0	2.035.000	2.010.354	0	0	0	2.010.354	98,79	100,00	24.646
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100,00	100,00	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.469.750	0	0	0	2.469.750	98,79	100,00	30.250
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100,00	100,00	0
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	22.300.000	0	22.300.000	22.300.000	0	0	0	22.300.000	22.295.000	0	0	0	22.295.000	99,98	99,98	5.000
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	354.297.592	0	354.297.592	354.297.592	0	0	0	354.297.592	337.315.516	0	0	0	337.315.516	95,21	95,21	16.982.076
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	29.586.592	0	29.586.592	29.586.592	0	0	0	29.586.592	29.586.430	0	0	0	29.586.430	100,00	100,00	162
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	34.711.000	0	34.711.000	34.711.000	0	0	0	34.711.000	33.154.956	0	0	0	33.154.956	93,70	93,70	1.556.044
3	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	284.574.130	0	0	0	284.574.130	94,86	94,86	15.425.870
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	23.169.183	0	23.169.183	23.169.183	0	0	0	23.169.183	22.680.000	0	0	0	22.680.000	97,89	97,89	489.183
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nico Prasidjo, S.Sos, MAP	23.169.183	0	23.169.183	23.169.183	0	0	0	23.169.183	22.680.000	0	0	0	22.680.000	97,89	97,89	489.183
II. PROGRAM KEBANGKAWAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																		
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Reza Hendriyadi, SE, MM	414.594.500	0	414.594.500	414.594.500	0	0	0	414.594.500	387.981.900	0	0	0	387.981.900	93,58	93,58	26.612.600
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APED	Reza Hendriyadi, SE, MM	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0	140.000.000	117.080.400	0	0	0	117.080.400	83,63	83,63	22.919.600
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rozali, SE, ME	69.594.500	0	69.594.500	69.594.500	0	0	0	69.594.500	69.594.500	0	0	0	69.594.500	100,00	100,00	0
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Slit Oka Sabrine, SH	205.000.000	0	205.000.000	205.000.000	0	0	0	205.000.000	201.307.000	0	0	0	201.307.000	98,20	98,20	3.693.000
2.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Ridwan Efendi, SE	302.697.600	0	302.697.600	302.697.600	0	0	0	302.697.600	302.697.600	0	0	0	302.697.600	100,00	100,00	0
1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Ridwan Efendi, SE	77.697.600	0	77.697.600	77.697.600	0	0	0	77.697.600	77.697.600	0	0	0	77.697.600	100,00	100,00	0
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rozetuli Adawiyah, SP	145.000.000	0	145.000.000	145.000.000	0	0	0	145.000.000	145.000.000	0	0	0	145.000.000	100,00	100,00	0
3	Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknik Pembangunan Daerah	Firdawati, S.Kom, <u>ALU</u>	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	100,00	100,00	0
TOTAL			1.127.863.875	0	1.127.863.875	1.127.863.875	0	0	0	1.127.863.875	1.082.762.620	0	0	0	1.082.762.620	96,00	96,03	45.101.255

Keterangan :

	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
- Belanja Operasi	1.127.863.875	1.082.762.620	96,00
- Belanja Modal	0	0	
- Belanja Tak Terduga	0	0	
- Belanja Transfer	0	0	
Jumlah	1.127.863.875	1.082.762.620	96,00

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 s/d Triwulan II**

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output	Kelompok Sasaran	Target				Realisasi			
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi capaian perangkat daerah									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan RENJA	Biro Adm Pembangunan	1	1			1	1		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		1	1			1	1		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	0			0	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD		1	0			1	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	0			0	0		
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi pemantauan dan pelaporan capaian pelaksanaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Biro Adm Pembangunan	1	0			1	0		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Biro Adm Pembangunan	2	0			2	0		

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Jumlah/Jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Biro Adm Pembangunan	0	0			0	0		
		Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang difasilitasi	Biro Adm Pembangunan	10	14			10	14		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Biro Adm Pembangunan	1	1			1	1		
2	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										

		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Rekomendasi Bahan Rumusan Kebijakan Standar Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBD yang akan ditindaklanjuti dan Kajian Permasalahan dalam rangka Pengendalian Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBD	Biro Adpem Setda Prov. Jambi	1	1			1	1		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Rekomendasi Bahan Rumusan Kebijakan Standar Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBN yang akan ditindak lanjuti dan Kajian Permasalahan dalam rangka Pengendalian Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBN	Biro Adpem Setda Prov. Jambi	1	1			1	1		

		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Rekomendasi Bahan Rumusan Kebijakan Standar Pegendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yang akan ditindak lanjuti	Biro Adpem Setda Prov. Jambi	1	1			1	1		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		-								
		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Rekomendasi Bahan Rumusan Kebijakan teknik analisis capaian kinerja pembangunan daerah dan jumlah dokumen analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Biro Adpem Setda Prov. Jambi	1	1			1	1		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Biro Adpem Setda Prov. Jambi	1	1			1	1		
			Kegiatan Pembangunan Daerah									
		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Biro Adpem Setda Prov. Jambi	1	1			1	1		

3.2. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi.

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Dalam budaya kerja aparatur, lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan KKN.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, antara lain :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia :
 - Jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja (monitoring dan evaluasi proyek pembangunan cukup luas)
 - Kompetensi ASN belum sepenuhnya sesuai bidang
 - Kurangnya pelatihan teknis dalam penggunaan aplikasi monitoring pembangunan dan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Koordinasi Lintas Perangkat daerah Lemah :
 - Biro seringkali mengalami kesulitan memperoleh data fisik dan keuangan dari Perangkat daerah tepat waktu
 - Tidak semua Perangkat Daerah menggunakan format pelaporan yang sama sehingga menyulitkan konsolidasi data pembangunan
 - Koordinasi dengan pihak eksternal (Bappeda, Inspektorat, BPKPD) masih terfragmentasi
- c. Keterlambatan dan Kualitas Data Pembangunan :

- Data hasil pembangunan yang dilaporkan sering tidak mutakhir, kurang valid atau tidak sinkron dengan data Bappeda
- Kurangnya sistem informasi terpadu untuk monitoring proyek (misalnya e-monev belum diimplementasikan optimal)
- d. Permasalahan Anggaran dan Saran Prasarana :
 - Anggaran operasional biro relatif terbatas terutama untuk kegiatan pengawasan lapangan, monitoring dan evaluasi proyek pembangunan daerah
 - Sarana prasarana (perangkat IT, jaringan, kendaraan dinas untuk monitoring lapangan) sering belum memadai
 - Belum seluruh kegiatan dapat didukung dengan sistem berbasis elektronik karena keterbatasan infrastruktur digital
- e. Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev)
 - Sistem monev belum sepenuhnya berbasis data real-time
 - Pelaporan manual masih dominan
 - Kesulitan memantau proyek-proyek fisik di daerah terpencil karena keterbatasan sumber daya dan logistik.
- f. Permasalahan Kultural dan Mindset Aparatur :
 - Masih terdapat budaya kerja yang kurang adaptif terhadap inovasi digital
 - Beberapa pegawai belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi pembangunan
 - Resistensi terhadap perubahan (misalnya penggunaan aplikasi e-Monev atau e-Kinerja)
- .g. Hambatan strategis :
 - Sinkronisasi antara perencanaan (Bappeda) dan pelaksanaan (Biro Administrasi pembangunan) belum optimal
 - Kurangnya indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah
 - Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan evaluasi Pembangunan lintas sektor

Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baik fisik konstruksi maupun non fisik dengan metode lelang, pengadaan langsung, dll. Dapat dilakukan sesuai jadwal	PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi, koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap kegiatankegiatan yang terkendala dalam proses pelaksanaannya	proses persiapan, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran yang dilakukan SKPD dengan pihak penyedia terkait sekaligus sebagai penanggungjawab	Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak penyedia dalam proses pelaksanaan kegiatan
	Mengetahui progress penyerapan dan pelaksanaan kegiatan serta kendala yang mempengaruhinya				
Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Tersedianya dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan APBD	Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan bahan penyusunan RAPBD, dan perubahan APBD (SSH, HSPK, dan ASB)	Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pedoman Penyusunan Anggaran	Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran yang belum sesuai prioritas kebutuhan dan target yang ingin dicapai
	Tersedianya dokumen Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisa Standar Belanja	Pergub Jambi tentang Satuan Standar Harga (SSH)		Fluktuasi Harga Pasar sebagai objek survey dipengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah	Usulan SSH, HSPK, atau ASB yang akan digunakan oleh SKPD tidak memiliki data pendukung yang benar dan lengkap (tidak sesuai)
Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Tersedianya dokumen evaluasi program dan kegiatan	PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap penyediaan dokumen evaluasi dan laporan kinerja APBD	Indikator pengukuran evaluasi kurang jelas	Pengukuran impact hasil intervensi kadang tidak bisa diukur secara kuantitatif
	Tersedianya dokumen pengukuran kinerja APBD			Kurangnya jumlah tim evaluator	Hasil intervensi terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung

RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan

Pada bagian ini ditulis sebagai arahan dan panduan pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi selama tahun 2021 -2026. Acuan utama penulisan dokumen ini adalah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan hasil analisa situasi perkembangan Provinsi Jambi serta tantangan yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sasaran strategis provinsi yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah.

Terkait dengan sasaran strategis tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan maka secara umum tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatkan kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan secara optimal. Selanjutnya dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
2. Persentase capaian kinerja pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah
3. Persentase capaian kinerja pembangunan daerah
4. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan yang dilaksanakan

5. Indeks kepuasan terhadap pelayanan biro (Nilai IKM)
6. Peningkatan predikat SAKIP

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026

**RANCANGAN ANGGARAN BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026**

	1 bulan	1 tahun	Jumlah Pegawai	Total Honor setelah kenaikan	Total Honor sebelum kenaikan	Selisih total Honor
Honor PTT	Rp 1.600.000,00	Rp 19.200.000,00	4	Rp 76.800.000,00	Rp 72.000.000,00	Rp 4.800.000,00
Honor Tenaga Ahli	Rp 3.000.000,00	Rp 36.000.000,00	1	Rp 36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp -
				Rp 112.800.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp 4.800.000,00

	pagu + honor	pagu tanpa honor
Total PAGU 2026 sebelum KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026	Rp 904.409.454,00	Rp 796.409.454,00
Total PAGU KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026	Rp 819.855.273,00	Rp 707.055.273,00
Total Pemotongan	Rp 84.554.181,00	Rp 89.354.181,00
Persentase Pemotongan	9,349104061887 %	11,21962836468 %

SUB KEGIATAN	Total PAGU 2026 sebelum KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026	Total PAGU 2026 sebelum KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 Tanpa Honor PTT	Besar Pemotongan KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 Tanpa Honor PTT dengan persentase rata 11 %	Total PAGU KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 tanpa Honor PTT	Kenaikan Honor PTT	Total PAGU KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 + kenaikan honor ptt
4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 88.165.000,00	Rp 88.165.000,00	Rp 9.891.785,35	Rp 78.273.214,65	Rp -	Rp 78.273.214,65
4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 53.522.337,00	Rp 53.522.337,00	Rp 6.005.007,30	Rp 47.517.329,70	Rp -	Rp 47.517.329,70
4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 156.978.400,00	Rp 120.978.400,00	Rp 13.573.326,88	Rp 107.405.073,12	Rp 2.400.000,00	Rp 145.805.073,12
4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 154.016.040,00	Rp 100.016.040,00	Rp 11.221.427,99	Rp 88.794.612,01	Rp 1.200.000,00	Rp 143.994.612,01
4.01.08.1.02.0003 Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp 118.016.040,00	Rp 100.016.040,00	Rp 11.221.427,99	Rp 88.794.612,01	Rp 1.200.000,00	Rp 107.994.612,01

4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.950.000,00	Rp 2.950.000,00	Rp 330.979,04	Rp 2.619.020,96	Rp -	Rp 2.619.020,96
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 252.441,64	Rp 1.997.558,36	Rp -	Rp 1.997.558,36
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 252.441,64	Rp 1.997.558,36	Rp -	Rp 1.997.558,36
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 403.906,62	Rp 3.196.093,38	Rp -	Rp 3.196.093,38
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 403.906,62	Rp 3.196.093,38	Rp -	Rp 3.196.093,38
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 24.850.000,00	Rp 24.850.000,00	Rp 2.788.077,65	Rp 22.061.922,35	Rp -	Rp 22.061.922,35
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 38.519.560,00	Rp 38.519.560,00	Rp 4.321.751,48	Rp 34.197.808,52	Rp -	Rp 34.197.808,52
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 20.245.000,00	Rp 20.245.000,00	Rp 2.271.413,76	Rp 17.973.586,24	Rp -	Rp 17.973.586,24
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 221.247.077,00	Rp 221.247.077,00	Rp 24.823.099,81	Rp 196.423.977,19	Rp -	Rp 196.423.977,19
4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 14.200.000,00	Rp 14.200.000,00	Rp 1.593.187,23	Rp 12.606.812,77	Rp -	Rp 12.606.812,77
Total Pagu	Rp 904.409.454,00	Rp 796.409.454,00	Rp 89.354.181,00	Rp 707.055.273,00	Rp 4.800.000,00	Rp 819.855.273,00
			Total PAGU SEBELUM KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 + kenaikan honor ptt BAGIAN TATA USAHA	Rp 333.711.637,00	Total PAGU KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 + kenaikan honor ptt BAGIAN TATA USAHA	Rp 296.270.431,52
			Total PAGU SEBELUM KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 + kenaikan honor ptt BAGIAN PELAPORAN	Rp 272.032.080,00	Total PAGU KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 + kenaikan honor ptt BAGIAN PELAPORAN	Rp 251.989.224,01
			Total PAGU SEBELUM KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 + kenaikan honor ptt	Rp 298.665.737,00	Total PAGU KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 + kenaikan honor ptt BAGIAN PENGENDALIAN	
				Rp 271.595.617,47		
				Rp 904.409.454,00		
				Rp 819.855.273,00		

P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA-PD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi tahun 2026 ini merupakan acuan sementara dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang menjadi tanggung jawab biro, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadi berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mengacu pada Rencana Kerja ini diharapkan dalam penyusunan RKA dan DPA semua kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik dan dalam upaya meningkatkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dan mendukung pencapaian JAMBI MANTAP.